

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masa pandemi Covid-19 di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masa pandemi Covid-19 di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative. Spesifikasi penelitian ini yaitu *clinical legal research*. Lokasi penelitian ini yaitu Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan bahan yang akan disusun secara logis dan sistematis berdasarkan doktrin dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masa pandemi Covid-19 di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dalam melakukan pendaftaran calon KPM Pemerintah Desa Jetis menitikberatkan pada 3 (tiga) kriteria yaitu keluarga miskin non PKH / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencakarian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Lampiran II Permendes PDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penyaluran BLT—DD Desa Jetis dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penerima sebanyak 231 KPM. Mekanisme penyaluran telah melalui proses Musdesus dengan melibatkan unsur-unsur yang ada, perubahan APB Desa dan penyaluran bantuan telah sesuai dengan regulasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masa pandemi Covid-19 di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yaitu masih terdapat warga kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 tetapi belum terdaftar dalam penerima bantuan, adanya warga yang menuntut diberikan bantuan tanpa melihat kriteria yang ada, dan masih minimnya warga kurang mampu yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah Desa Jetis diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk menghadapi kendala yang ada.

Kata kunci : pelaksanaan, program BLT Dana Desa, masa pandemic Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) Program during the Covid-19 pandemic in Jetis Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency, and to find out the obstacles faced by the Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) Program during the Covid-19 pandemic in Jetis Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is clinical law research. The location of this research is Jetis Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency. The data is presented in a form that is arranged systematically. The data obtained were analyzed qualitatively, namely by describing and discussing the materials that would be arranged logically and systematically based on the legal doctrines and understandings contained in the science of law.

Results Based on the research, the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) program during the Covid-19 pandemic in Jetis Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency, in collecting data on KPM candidates, the Jetis Village Government focuses on 3 (three) criteria, namely poor families non-PKH / Food Assistance Non-cash (BPNT) who have lost their livelihood, have not been recorded (exclusion error), and have family members who are prone to chronic/chronic illness. This is in accordance with the provisions of Attachment II of the Minister of Village Regulation No. 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2020. The distribution of BLT-DD Desa Jetis is carried out in 3 (three) stage with a total of 231 KPM recipients. the delivery mechanism has gone through the Musdesus process involving existing elements, changes to the Village Budget and assistance has been in accordance with regulations. Obstacles faced in implementing the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) program during the Covid-19 pandemic in Jetis Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency, namely that there are still underprivileged residents who operate the Covid-19 pandemic but have not been registered in the recipients of assistance, there are residents who demand to be given assistance without existing criteria, and the lack of poor people who have not been included in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The Jetis Village Government is expected to immediately take action to deal with the existing obstacles.

Keywords: implementation, the Village Fund BLT program, the Covid-19 pandemic